



PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

# 7 TAHUN

## *Implementasi Dana Desa*





# **TUJUH TAHUN IMPLEMENTASI DANA DESA**

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
2023**

# **Tujuh Tahun Implementasi Dana Desa**

**Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.**

**Penanggungjawab : Drs. Helmizar, M.E.**

## **Tim Penyusun**

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dr. Bagus Nurul Iman, M.Pd

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Dahiri, S.Si., M.Sc.

Adhi Prasetyo S.W, S.M, M.A.P.

Muhammad Anggara T. S, S.E.

Emillia Octavia, ST., M.Ak.

Ricka Wardianingsih, S.E, M.E.

Andriani Elizabeth, S.AP. M.B.A

Teuku Hafizh Fakhreza, S.E.

Linia Siska Risandi. S.AP

## **Penyunting**

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

## **Desain Sampul**

Orlando Raka Bestianta, S.E.

Cetakan Pertama, Februari 2023

ISBN: 000-000-00000-0-0

Diterbitkan oleh

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

All rights reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

## SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbinganNya sehingga Pusat Kajian Anggaran mampu menyelesaikan salah satu tugasnya dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, dengan menerbitkan buku “Tujuh Tahun Implementasi Dana Desa “. Sebagai unit kerja yang memberikan dukungan



pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI, Pusat Kajian Anggaran terus memberikan dukungan optimal salah satunya melalui penerbitan buku yang mengangkat isu-isu strategis seperti Dana Desa. Pelaksanaan dana desa yang optimal dan efektif menjadi salah satu kunci sukses bagi pembangunan desa yang kemudian menjadi penentu kemajuan tanah air. Pernyataan ini tentunya tidak berlebihan, secara hirariki negara yang maju akan ditentukan oleh provinsi yang maju, provinsi yang maju tentu ditentukan oleh kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten atau kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju.

Terbitnya UU Desa telah memberi harapan baru bagi pembangunan desa. Kehadiran Undang-Undang tersebut turut memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri dan berdaya untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mewujudkan tujuan mulia tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar kepada Desa. Sejak diterapkan 2015, total Dana Desa yang telah dialokasikan Pemerintah hampir mendekati Rp500 triliun. Anggaran sebesar ini diharapkan dapat menjadi pengungkit perekonomian dari Desa yang kedepannya dapat menjadi penyokong perekonomian nasional. Hingga kurun waktu tujuh tahun pelaksanaannya, Dana Desa telah memberikan manfaat bagi masyarakat desa terutama dengan semakin banyaknya infrastruktur perdesaan.

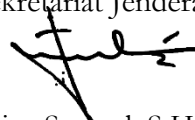
Namun demikian, masih terdapat persoalan krusial dalam pengelolaan dana desa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa.

Hal yang menjadi catatan penting bagi pelaksanaan Dana Desa ialah pentingnya keterlibatan masyarakat desa yang luas dan optimal dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dana desa karena penggunaan dana desa harus sesuai dengan kebutuhan desa dan dipastikan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat desa. Manfaat tersebut ialah peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik. Disamping itu, pemanfaatan Dana Desa perlu lebih dioptimalkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa agar tercipta masyarakat yang mandiri dan unggul. Dalam mewujudkan kebermanfaatan Dana Desa bagi seluruh masyarakatnya maka Pemerintah harus terus memperbaiki distribusi pembagian, penyaluran, pemanfaatan, dan pengawasan Dana Desa. Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa juga harus terus memperbaiki tata kelola keuangan desa baik dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Dalam buku ini akan memberikan gambaran efektivitas implementasi dana desa terhadap tujuan Desa selama tujuh tahun ini yang kemudian diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman bagi perbaikan pengelolaan dana desa kedepannya. Buku ini diharapkan selain dapat menjadi sumber informasi oleh Pimpinan dan Anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi anggaran, juga menjadi referensi bagi para pengelola keuangan desa dan berbagai pihak yang terkait dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

Jakarta, Februari 2023

Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI



Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

196507101990031007

## PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga proses penyusunan buku “Tujuh Tahun Implementasi Dana Desa” dapat diselesaikan dengan baik. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia sebagai referensi para akademisi dan para pemangku kebijakan agar keberadaan dana desa dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.



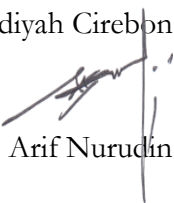
Buku ini merupakan hasil kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Cirebon bersama Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI melalui kegiatan kolaborasi pelaksanaan Kuliah Kerjasama Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon pada bulan Agustus 2022 di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Dengan kolaborasi penelitian ini, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan gambaran implementasi dana desa di tiga Kabupaten dan mahasiswa mendapatkan tambahan ilmu yang tidak diajarkan diperkuliah, seperti bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat untuk mengali data data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Banyak sekali tantangan dalam menggali informasi yang dibutuhkan karena dana desa sangat sensitif keberadaanya dalam pengelolaan dan implementasinya, sehingga mahasiswa dengan kreativitasnya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan jumlah, pengelolaan, dan realisasinya.

Secara umum, buku ini telah mampu menggambarkan bagaimana implementasi dana desa selama tujuh tahun dan kebermanfaatannya dalam percepatan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Buku ini juga menggambarkan efektivitas dana desa serta pengaruhnya terhadap permasalahan desa dimana sampling tiga kabupaten yang dijadikan objek penelitian merupakan contoh nyata dan mungkin dapat digeneralisasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam implementasi dana desa, terutama di Pulau Jawa.

Semoga buku “Tujuh Tahun Implementasi Dana Desa” ini dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta referensi bagi masyarakat, peneliti dan pemangku kebijakan, tentunya untuk lebih mengefektifkan pengelolaannya sehingga amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dapat tercapai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, atas kerjasama ini Universitas Muhammadiyah Cirebon dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa

Februari 2023

Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon



Arif Nurudin



## PENGANTAR KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku “Tujuh Tahun Implementasi Dana Desa“ yang disusun oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Penyusunan buku ini merupakan bagian dari kerja sama Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Universitas Muhammadiyah Cirebon.



Sejak diterapkan 2015, implementasi dana desa telah berusia 7 (tujuh) tahun dengan total anggaran hampir mendekati Rp500 triliun. Apabila merujuk pada UU Desa dan peraturan pelaksanaannya, implementasi dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Penyusunan buku ini bertujuan untuk menguji apakah implementasi dana desa tersebut mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan UU Desa. Pengujian yang dilakukan yaitu menguji pengaruh implementasi dana desa terhadap beberapa indikator yang mencerminkan pencapaian tujuan diberlakukannya dana desa (indikator *goals*) dan pencapaian indikator *output*/antara, serta menguji apakah terdapat perbedaan kondisi indikator tujuan dan indikator *output*/antara sebelum dan sesudah implementasi dana desa. Hasil pengujian empiris menemukan bahwa implementasi dana desa periode 2015-2020 memiliki

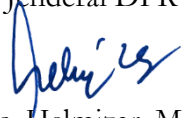
pengaruh positif terhadap beberapa indikator yang dijadikan ukuran dan terdapat perbedaaan kondisi berbagai indikator secara signifikan sebelum dan sesudah implementasi dana desa.

Selain itu, penyusunan buku ini juga bertujuan menilai efektivitas dana desa dengan menggunakan pendekatan studi kasus di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Untuk menguji efektivitas dana desa di tiga kabupaten tersebut, buku ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan desain analisis statistik deskriptif dengan teknik survei persepsi. Data primer yang digunakan yaitu data survei persepsi masyarakat yang dilakukan di beberapa desa yang berada di ketiga kabupaten, yang dilakukan melalui kerja sama antara Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Survei dilaksanakan oleh mahasiswa peserta Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) pada tanggal 9-30 Agustus 2022 dengan menggunakan pendekatan *non probability purposive sampling*. Selain itu, pengujian efektivitas juga menggunakan pendekatan wawancara mendalam dengan pemerintah kabupaten dan beberapa perwakilan kepala desa dari lokus penelitian, yang sekaligus juga mengkonfirmasi hasil survei yang telah dilakukan. Hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di ketiga kabupaten belum berjalan secara optimal dan masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan efektivitas dana desa di masa mendatang.

Secara keseluruhan, hasil akhir dari penyusunan buku ini diharapkan mampu memberikan sedikit gambaran bagaimana pengaruh implementasi dana desa yang sudah berjalan sejak 2015 terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan. Selain itu, penyusunan buku ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran efektivitas dana desa saat ini dan upaya apa yang sebaiknya menjadi fokus dalam konteks efektivitas dana desa di masa mendatang.

Demikianlah buku ini disusun oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Semoga dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta referensi oleh Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI dalam melaksanakan fungsi anggaran. Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang terhormat.

Jakarta, Februari 2023  
Kepala Pusat Kajian Anggaran  
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI



Drs. Helmizar, M.E.  
NIP. 196407191991031001



## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR KEPALA BADAN KEAHLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGANTAR KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB PERTAMA</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Kajian.....	5
<b>BAB KEDUA</b>	
<b>TINJAUAN LITERATUR.....</b>	<b>7</b>
A. Dana Desa .....	7
B. Konsep Efektivitas.....	9
C. Konsep Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi serta Hubungannya Terhadap Efektivitas Program atau Kebijakan Publik .....	12
D. Pendanaan Desa (Sejenis Dana Desa) di Negara Lain.....	17
E. Studi Empiris Pengaruh Dana Desa Terhadap Indikator Goals dan Indikator Output.....	24
<b>BAB KETIGA</b>	
<b>METODOLOGI KAJIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Dasar Pikir Kajian .....	29
B. Data Kajian .....	30
C. Metodologi.....	32

## **BAB KEEMPAT**

<b>ANGGARAN DANA DESA DAN PENGGUNAANNYA .....</b>	<b>38</b>
A. Anggaran Dana Desa dan Penggunaannya Pada Lingkup Nasional .....	38
B. Anggaran Dana Desa dan Penggunaannya di Regional Sumatera .....	44
C. Anggaran Dana Desa dan Penggunaannya di Regional Jawa .....	47
D. Anggaran Dana Desa dan Penggunaannya di Regional Kepulauan Nusa Tenggara .....	51
E. Anggaran Dana Desa dan Penggunaannya di Regional Kalimantan .....	55
F. Anggaran Dana Desa dan Penggunaannya di Regional Sulawesi .....	58
G. Anggaran Dana Desa dan Penggunaannya di Regional Kepulauan Maluku .....	62
H. Anggaran Dana Desa dan Penggunaannya di Regional Papua .....	65

## **BAB KELIMA**

<b>ANALISIS UJI PENGARUH DAN UJI BEDA INDIKATOR GOALS DAN INDIKATOR OUTPUT .....</b>	<b>69</b>
A. Pengaruh Dana Desa Terhadap Indikator Goals .....	69
B. Perbedaan Kondisi Indikator Goals Periode Sebelum dan Sesudah Implementasi Dana Desa .....	73
C. Pengaruh Dana Desa Terhadap Indikator Output/Antara .....	80
D. Perbedaan Indikator Output/Antara Periode Sebelum dan Sesudah Implementasi Dana Desa .....	82

## **BAB KEENAM**

<b>EFEKTIVITAS DANA DESA: STUDI KASUS KABUPATEN CIREBON, MAJALENGKA DAN KUNINGAN .....</b>	<b>87</b>
A. Analisis Deskriptif Hasil Survei .....	87
B. Harapan Responden Berdasarkan Hasil Survei .....	95

## **BAB KETUJUH**

<b>PENUTUP</b> .....	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Rekomendasi Kebijakan .....	105
C. Rekomendasi Kajian Lanjutan.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>113</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Dasar Pikir UU Desa Terkait Dana Desa .....	2
Gambar 3.1	Dasar Pikir Kajian .....	30
Gambar 3.2	Variabel Pengukuran Efektivitas Dana Desa .....	35
Gambar 3.3	Sub Variabel Infrastruktur dan Pelayanan Dasar ...	36
Gambar 3.4	Sub Variabel Pemberdayaan Masyarakat .....	37
Gambar 3.5	Sub Variabel Kebermanfaatan .....	37
Gambar 4.1	Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2015-2020 .....	38
Gambar 4.2	Proporsi Realisasi Dana Desa Per Regional Periode 2015-2020 .....	39
Gambar 4.3	Perkembangan Output Dana Desa Secara Nasional Tahun 2015-2020 .....	40
Gambar 4.4	Distribusi Output Dana Desa Per Regional Periode 2015-2020 .....	41
Gambar 4.5	Perkembangan Desa Menurut Status Pada Tiap Regional Tahun 2015-2020 .....	42
Gambar 4.6	Capaian Status SDGs Desa Tiap Provinsi .....	43
Gambar 4.7	Alokasi Dana Desa di Regional Sumatera Tahun 2015-2020 .....	44
Gambar 4.8	Perkembangan Output Dana Desa di Regional Sumatera Periode 2015-2020 .....	45
Gambar 4.9	Distribusi Output Dana Desa Per Provinsi di Regional Sumatera Periode 2015-2020 .....	46
Gambar 4.10	Status Desa di Regional Sumatera Tahun 2015-2020 .....	47
Gambar 4.11	Alokasi Dana Desa di Regional Jawa Periode 2015-2020 .....	48
Gambar 4.12	Perkembangan Output Dana Desa di Regional Jawa tahun 2015-2020 .....	48
Gambar 4.13	Distribusi Output Dana Desa Per Provinsi di Regional Jawa Periode 2015-2020 .....	49
Gambar 4.14	Status Desa di Regional Jawa Tahun 2015-2020 ....	51
Gambar 4.15	Alokasi Dana Desa di Regional Kepulauan Nusa Tenggara Periode 2015-2020 .....	51
Gambar 4.16	Distribusi Output Dana Desa di Regional	



	Kepulauan Nusa Tenggara Periode 2015-2020 .....	52
Gambar 4.17	Perkembangan Output Dana Desa di Regional Kepulauan Nusa Tenggara Periode 2015-2020 .....	53
Gambar 4.18	Status Desa di Regional Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2015-2020 .....	54
Gambar 4.19	Alokasi Dana Desa di Regional Kalimantan Periode 2015-2020 .....	55
Gambar 4.20	Perkembangan Output Dana Desa di Regional Kalimantan Periode 2015-2020 .....	56
Gambar 4.21	Distribusi Output Dana Desa di Regional Kalimantan Periode 2015-2020 .....	56
Gambar 4.22	Status Desa di Regional Kalimantan Tahun 2015- 2020 .....	58
Gambar 4.23	Alokasi Dana Desa di Regional Sulawesi Periode 2015-2020 .....	59
Gambar 4.24	Perkembangan Output Dana Desa di Regional Sulawesi Periode 2015-2020 .....	59
Gambar 4.25	Distribusi Output Dana Desa di Regional Sulawesi Periode 2015-2020 .....	60
Gambar 4.26	Status Desa di Regional Sulawesi 2015-2020 .....	61
Gambar 4.27	Alokasi Dana Desa di Regional Kepulauan Maluku Periode 2015-2020 .....	63
Gambar 4.28	Perkembangan Ouput Dana Desa di Regional Kepulauan Maluku Periode 2015-2020 .....	63
Gambar 4.29	Distribusi Output Dana Desa di Regional Kepulauan Maluku Periode 2015-2020 .....	64
Gambar 4.30	Status Desa di Regional Kepulauan Maluku Periode 2015-2020 .....	65
Gambar 4.31	Alokasi Dana Desa di Regional Papua Periode 2015-2020 .....	66
Gambar 4.32	Perkembangan Output Dana Desa di Regional Papua Periode 2015-2020 .....	66
Gambar 4.33	Distribusi Output Dana Desa di Regional Papua Periode 2015-2020 .....	67
Gambar 4.34	Status Desa di Regional Papua Periode 2015-2020	68
Gambar 5.1	IPM Sebelum dan Sesudah Dana Desa .....	73
Gambar 5.2	AHH Sebelum dan Sesudah Dana Desa .....	74

Gambar 5.3	AK Sebelum dan Sesudah Dana Desa .....	75
Gambar 5.4	KDM Sebelum dan Sesudah Dana Desa .....	77
Gambar 5.5	KPM Sebelum dan Sesudah Dana Desa .....	78
Gambar 5.6	KG Sebelum dan Sesudah Dana Desa .....	79
Gambar 5.7	PDRB Pertanian Sebelum dan Sesudah Dana Desa	83
Gambar 5.8	PDRB Per Kapita Sebelum dan Sesudah Dana Desa .....	84
Gambar 5.9	APK PAUD Sebelum dan Sesudah Dana Desa ...	85
Gambar 5.10	PDRB Pertanian Sebelum dan Sesudah Dana Desa	86
Gambar 6.1	Efektivitas Dana Desa Menurut Variabel .....	87
Gambar 6.2	Nilai Sub Variabel Infrastruktur dan Layanan Dasar .....	92
Gambar 6.3	Nilai Sub Variabel Pemberdayaan Masyarakat .....	93
Gambar 6.4	Nilai Sub Variabel Kebermanfaatan .....	95
Gambar 6.5	Harapan Responden di Kabupaten Cirebon .....	96
Gambar 6.6	Harapan Responden di Kabupaten Majalengka ....	97
Gambar 6.7	Harapan Responden di Kabupaten Kuningan .....	98

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Beberapa Parameter Sebelum dan Sesudah Dana Desa .....	3
Tabel 2.1	Parameter Good Governance .....	14
Tabel 3.1	Jumlah Desa dan Responden Survei Persepsi .....	31
Tabel 4.1	Capaian SDGs Desa di Regional Sumatera .....	46
Tabel 4.2	Capaian SDGs Desa di Regional Jawa .....	50
Tabel 4.3	Capaian SDGs Desa di Regional Kepulauan Nusa Tenggara .....	54
Tabel 4.4	Capaian SDGs Desa di Regional Kalimantan .....	57
Tabel 4.5	Capaian SDGs Desa di Regional Sulawesi .....	61
Tabel 4.6	Capaian SDGs Desa di Regional Kepulauan Maluku ...	64
Tabel 4.7	Capaian SDGs Desa di Regional Papua .....	68
Tabel 5.1	Hasil Estimasi Pengaruh Dana Desa Terhadap IPM, AHH, AK, KDM, KPM dan KG .....	69
Tabel 5.2	Hasil Estimasi Pengaruh Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Menurut Wilayah .....	70
Tabel 5.3	Hasil Estimasi Pengaruh Dana Desa Terhadap Angka Harapan Hidup Menurut Wilayah .....	71
Tabel 5.4	Hasil Estimasi Pengaruh Dana Desa Terhadap Angka Kemiskinan Menurut Wilayah .....	71
Table 5.5	Hasil Estimasi Pengaruh Dana Desa Terhadap Kedalaman Kemiskinan Menurut Wilayah .....	72
Tabel 5.6	Hasil Estimasi Pengaruh Dana Desa Terhadap Keparahan Kemiskinan Menurut Wilayah .....	72
Tabel 5.7	Hasil Estimasi Pengaruh Dana Desa Terhadap Koefisien Gini Menurut Wilayah .....	73
Tabel 5.8	Uji Beda IPM Berdasarkan Regional .....	74
Tabel 5.9	Uji Beda AHH Berdasarkan Regional .....	75
Tabel 5.10	Uji Beda AK Berdasarkan Regional .....	76
Table 5.11	Uji Beda KDM Berdasarkan Regional .....	77
Tabel 5.12	Uji Beda KPM Berdasarkan Regional .....	79
Tabel 5.13	Uji Beda KG Berdasarkan Regional .....	80
Tabel 5.14	Hasil Estimasi Pengaruh Dana Desa Terhadap PDRB Pertanian, PDRB Per Kapita, APK PAUD dan APM SD .....	80

Tabel 5.15	Hasil Estimasi Pengaruh Dana Desa Terhadap PDRB Pertanian Menurut Regional .....	81
Tabel 5.16	Hasil Estimasi Pengaruh Dana Desa Terhadap PDRB Per Kapita Menurut Regional .....	81
Tabel 5.17	Hasil Estimasi Pengaruh Dana Desa Terhadap APK PAUD Menurut Regional .....	82
Tabel 5.18	Hasil Estimasi Pengaruh Dana Desa Terhadap APM SD Menurut Regional .....	82
Tabel 5.19	Uji Beda PDRB Pertanian Berdasarkan Regional .....	83
Tabel 5.20	Uji Beda PDRB Per Kapita Berdasarkan Regional .....	84
Tabel 5.21	Uji Beda APK Paud Berdasarkan Regional .....	85
Tabel 5.22	Uji Beda APM SD Berdasarkan Regional .....	86

